



EROSI OTORITAS PENGETAHUAN: Kajian Epistemologis Terhadap Fenomena Post-Truth dan Skeptisisme Ilmiah di Era Digital

Hari Harsananda¹, Mery Ambarnuari²

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar^{1,2}

hariharsananda@uhnsugriwa.ac.id¹, mery.ambarnuari@uhnsugriwa.ac.id²

ABSTRACT

Keywords:

erosion of
knowledge
authority, post-
truth
epistemology,
catur pramāṇa,
Hindu
epistemology,
logical fallacy

Accepted: 09-03-2026

Revised: 21-08-2026

Approved: 11-09-2026

This study addresses a gap in existing scholarship on the erosion of knowledge authority: prior work has largely approached the post-truth condition through digital-communication and cognitive-psychology lenses, while analysis grounded in classical epistemology, particularly Hindu epistemology, remains scarce. Employing a qualitative library-research design, this study analyzes philosophical and epistemological literature (classical and contemporary epistemology, philosophy of science, cognitive-bias theory, and post-truth/digital-communication studies) to identify the internal factors (cognitive biases, logical fallacies) and external factors (digital-platform transformation, social-media algorithms, the attention economy, weak journalistic practice, low media literacy) driving the delegitimization of scientific authority. The analysis shows that popularity increasingly substitutes for credibility, and that emotional narrative outweighs rational argument in shaping public opinion. Drawing on the Hindu doctrine of catur pramāṇa (pratyakṣa, anumāna, upamāna, and śabda), this study constructs a normative epistemic framework, distinguishing each pramāṇa's distinct epistemic function rather than treating them as a uniform "methodological verification", for evaluating the validity of claims in digital public discourse. This framework is offered as a conceptual contribution toward restoring public trust in knowledge grounded in disciplined, rationally accountable methods.

ABSTRAK

Kata Kunci:

erosi otoritas
pengetahuan,
epistemologi post-
truth, catur
pramāṇa,
epistemologi
Hindu, kesesatan
berpikir.

diterima: 09-03-2026

direvisi: 21-08-2026

disetujui: 11-09-2026

Penelitian ini bertolak dari kesenjangan kajian (research gap): studi tentang erosi otoritas pengetahuan di era post-truth selama ini banyak didekati dari perspektif komunikasi digital dan psikologi kognitif, sementara analisis dari perspektif epistemologi klasik, khususnya epistemologi Hindu, masih jarang dilakukan. Menggunakan desain studi kepustakaan (library research) kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur epistemologi klasik dan kontemporer, filsafat ilmu, teori bias kognitif, serta kajian post-truth dan komunikasi digital, untuk mengidentifikasi faktor internal (bias kognitif, kesesatan berpikir/logical fallacy) dan faktor eksternal (transformasi lanskap digital, algoritma media sosial, ekonomi atensi, lemahnya praktik jurnalistik, rendahnya literasi media) yang menyebabkan delegitimasi

otoritas ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa popularitas kian menggantikan kredibilitas, dan narasi emosional lebih berpengaruh daripada argumentasi rasional dalam membentuk opini publik. Bertumpu pada ajaran Catur Pramāṇa dalam epistemologi Hindu (pratyakṣa, anumāna, upamāna, dan śabda), penelitian ini menyusun kerangka epistemik normatif, dengan membedakan fungsi epistemik masing-masing pramāṇa, bukan menyamaratakannya sebagai “verifikasi metodologis”, untuk menilai keabsahan klaim dalam ruang wacana publik digital. Kerangka ini diajukan sebagai kontribusi konseptual bagi pemulihan kepercayaan publik terhadap pengetahuan yang berpijak pada metode yang disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi signifikan dalam cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi pengetahuan. Kemunculan internet, media sosial, serta algoritma berbasis kecerdasan buatan telah menciptakan ekosistem epistemik yang berbeda secara fundamental dibandingkan era sebelumnya. Jika pada masa modern pengetahuan relatif terkonsentrasi pada otoritas institusional seperti lembaga pendidikan, lembaga riset, dan media arus utama, maka di era digital pengetahuan mengalami desentralisasi yang masif. Informasi tidak lagi dimonopoli oleh otoritas formal, melainkan tersebar secara horizontal melalui interaksi jutaan pengguna di ruang digital yang cair dan dinamis.

Transformasi ini melahirkan sejumlah konsekuensi mendasar. Salah satu yang paling menonjol adalah munculnya kondisi yang dalam diskursus kontemporer disebut sebagai post-truth, sebuah istilah yang mendapat sorotan luas sejak dipilih Oxford Dictionaries sebagai Word of the Year pada 2016, namun yang makna filosofisnya perlu didudukkan secara lebih presisi. Post-truth di sini tidak dipahami sebagai kondisi ketika fakta objektif “tidak lagi berperan” dalam wacana publik, melainkan sebagai kondisi epistemik ketika fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dibandingkan daya tarik emosi, keyakinan personal, dan identitas sosial dalam pembentukan opini (McIntyre, 2018); bandingkan (Piliang, 2010). Dalam kondisi demikian, kebenaran tidak lagi diukur terutama berdasarkan korespondensi dengan realitas atau verifikasi empiris, melainkan berdasarkan resonansi afektif dan afiliasi sosial, yaitu sebuah pergeseran ukuran validitas, bukan lenyapnya fakta itu sendiri.

Konsekuensi kedua adalah meningkatnya skeptisisme terhadap otoritas ilmiah dan akademik. Secara historis, modernitas menempatkan sains dan institusi akademik sebagai sumber legitimasi epistemik yang utama. Rasionalitas, koherensi logis, serta verifikasi empiris menjadi fondasi dalam menentukan validitas suatu klaim pengetahuan. Namun dalam lanskap digital, klaim ilmiah kerap dipertanyakan, dipelintir, atau bahkan ditolak mentah-mentah oleh kelompok masyarakat yang terpapar narasi alternatif melalui media sosial (Harsananda, 2020). Fenomena penolakan vaksin, maraknya teori konspirasi perubahan iklim, hingga relativisasi kebenaran sejarah melalui disinformasi digital menunjukkan adanya pergeseran paradigma epistemologis yang cukup radikal. Dalam konteks ini, terjadi apa yang dapat disebut sebagai erosi otoritas pengetahuan, yakni berkurangnya legitimasi epistemik dari aktor dan lembaga yang secara tradisional diakui memiliki kompetensi dalam mendefinisikan kebenaran.

Dari perspektif epistemologi, gejala tersebut dapat dipahami sebagai krisis dalam mekanisme pembenaran (justification) atas klaim pengetahuan. Epistemologi klasik menekankan bahwa suatu proposisi dianggap benar apabila memenuhi syarat-syarat rasionalitas dan didukung oleh bukti yang memadai. Namun dalam iklim *post-truth*, mekanisme tersebut sering kali dikalahkan oleh apa yang dapat disebut sebagai *affective reasoning*, yakni kecenderungan individu untuk mempercayai narasi yang selaras dengan emosi dan identitasnya, meskipun lemah secara argumentatif. Logika viralitas, yang bertumpu pada sensasi, keterlibatan emosional, dan algoritma distribusi konten, sering kali lebih menentukan penyebaran informasi dibandingkan validitas epistemiknya (Hardiman, 2021b).

Selain faktor epistemologis, perkembangan skeptisisme ilmiah di masyarakat kontemporer juga berkaitan erat dengan dimensi sosiologis dan politik. Skeptisisme dalam tradisi ilmiah sejatinya merupakan sikap kritis yang produktif, karena mendorong verifikasi dan pengujian berkelanjutan atas klaim kebenaran. Akan tetapi, dalam konteks digital, skeptisisme kerap bergeser menjadi *distrust* atau bahkan nihilisme epistemik, yakni sikap yang menolak hampir semua bentuk otoritas sebagai tidak kredibel. Kondisi ini diperparah oleh terbentuknya *echo chamber* dan *filter bubble* dalam media sosial, yaitu situasi di mana algoritma mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga individu lebih sering terpapar informasi yang menguatkan keyakinan mereka sendiri dan jarang bersentuhan dengan perspektif yang berbeda. Akibatnya, ruang publik terfragmentasi menjadi ruang-ruang kognitif yang homogen, yang memperkuat bias dan melemahkan kemampuan evaluasi kritis terhadap klaim pengetahuan.

Urgensi kajian mengenai erosi otoritas pengetahuan menjadi semakin nyata ketika mempertimbangkan dampak praktisnya yang luas. Krisis kepercayaan terhadap pengetahuan berbasis bukti tidak hanya berdampak pada ranah akademik, tetapi juga pada tata kelola masyarakat, perumusan kebijakan publik, hingga stabilitas demokrasi. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi ilmiah dan mekanisme rasional dalam menentukan kebenaran, ruang publik berpotensi dipenuhi oleh relativisme epistemik yang mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik maupun ekonomi. Dengan demikian, erosi otoritas pengetahuan bukan sekadar persoalan teoretis dalam filsafat, melainkan juga problem etis, sosial, dan politis yang mendesak untuk ditelaah secara mendalam. Dalam konteks akademik, fenomena ini menuntut reorientasi dalam diskursus epistemologi kontemporer. Jika epistemologi klasik berfokus pada relasi antara subjek dan objek pengetahuan, maka epistemologi di era digital perlu memperhitungkan peran mediasi teknologi, dinamika sosial, serta politik informasi sebagai variabel penting dalam produksi dan legitimasi kebenaran. Pengetahuan tidak lagi lahir dan diverifikasi dalam ruang netral, melainkan dalam jaringan digital yang sarat kepentingan, algoritma, dan logika ekonomi atensi.

Dalam kerangka inilah, artikel ini menganalisis erosi otoritas pengetahuan dari perspektif epistemologi untuk memahami mekanisme dan implikasi sosialnya. Kontribusi konseptual utama artikel ini adalah merumuskan kerangka penilaian epistemik berbasis Catur Pramāṇa, yaitu *pratyakṣa* (persepsi langsung), *anumāna* (inferensi rasional), *upamāna* (analogi/komparasi), dan *śabda* (kesaksian otoritatif), sebagai empat jalur epistemik yang berbeda struktur kerjanya, untuk membedakan klaim yang secara epistemik sah dari klaim yang

hanya persuasif secara retorik di ruang digital. Berbeda dari pendekatan verifikasi tunggal ala metode ilmiah modern, kerangka Catur Pramāṇa memungkinkan penilaian bertingkat: sebuah klaim dapat dinilai lemah pada jalur śabda (sumber tidak otoritatif) sekalipun tampak kuat pada jalur retorik-emosional. Kerangka inilah, bukan sekadar “dialog” normatif yang longgar, yang diajukan sebagai tawaran konseptual artikel ini bagi pemulihan rasionalitas publik di era digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis filosofis dan epistemologis (Kaelan, 2005). Data bersumber dari studi kepustakaan (library research) yang mencakup dua kelompok sumber. Sumber primer meliputi teks Nyāyadarśana (Maswinara, 1999), yang menjadi rujukan langsung bagi penjabaran konsep Catur Pramāṇa pada bagian pembahasan. Sumber sekunder meliputi karya-karya kontemporer di bidang epistemologi, filsafat ilmu, teori bias kognitif (khususnya (Kahneman, 2011), serta kajian post-truth dan transformasi digital (a.l. (McIntyre, 2018), ; (Piliang, 2010)(Hardiman, 2021b). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengidentifikasi konsep-konsep kunci, yaitu otoritas ilmiah, delegitimasi kepakaran, logical fallacy, bias kognitif, kemudian membacanya secara kritis-reflektif melalui kerangka Catur Pramāṇa untuk menemukan keterkaitan konseptual antara transformasi lanskap digital dan melemahnya legitimasi otoritas ilmiah.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengetahuan dan Kebenaran dalam Epistemologi Hindu: Pergeseran di Era Digital

Epistemologi sebagai cabang filsafat yang membahas hakikat, sumber, serta validitas pengetahuan senantiasa relevan dalam setiap fase perkembangan intelektual manusia. Sebelum memasuki perdebatan epistemologis yang lebih kompleks, perlu terlebih dahulu dipahami makna fundamental dari pengetahuan itu sendiri. Secara filosofis, pengetahuan dapat dipahami sebagai proses kehidupan yang disadari secara langsung oleh manusia dalam kesadarannya. Dalam peristiwa mengetahui, subjek (yang mengetahui) dan objek (yang diketahui) berada dalam relasi intensional; objek hadir dalam kesadaran subjek secara aktif sehingga membentuk suatu kesatuan pengalaman. Dalam arti luas, pengetahuan merujuk pada kehadiran intensional objek dalam subjek, sedangkan dalam arti sempit pengetahuan berarti putusan yang benar dan pasti, yang mengandung unsur kebenaran dan kepastian (Bagus, 2005).

Secara konseptual, pengetahuan (knowledge) merujuk pada informasi, pemahaman, serta keterampilan (skill) yang diperoleh melalui pengalaman maupun pendidikan. Dengan demikian, pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praksis, yang terbentuk melalui pengalaman sehari-hari, kesadaran reflektif, dan interaksi manusia dengan realitas (Zaprukhan, 2016)). Pada tahap tertentu, pengetahuan berkembang menjadi ilmu (scientia), yakni bentuk pengetahuan yang lebih sistematis, metodologis, dan terstruktur. Ilmu tidak sekadar kumpulan informasi, melainkan suatu sistem yang memuat hipotesis, teori, dan hukum, serta berupaya mencapai generalisasi melalui prosedur yang dapat diuji dan diverifikasi (Ihsan, 2010).

Dalam tradisi filsafat Barat, ilmu sering dipahami sebagai suatu *systematic body of knowledge* yang mencakup tiga unsur utama: pengetahuan, aktivitas, dan metode. Harold H. Titus, sebagaimana dikutip dalam (Zaprukhan, 2016),

menegaskan bahwa ilmu lebih tepat dipahami sebagai metode yang teratur untuk memperoleh pengetahuan objektif daripada sekadar kumpulan pengetahuan yang terhimpun. Inti dari ilmu terletak pada prosedur rasional dan mekanisme verifikasi yang menjamin objektivitasnya. Dengan demikian, baik dalam tradisi Barat maupun dalam kerangka ilmiah modern, pengetahuan yang sah selalu dikaitkan dengan metodologi yang ketat dan proses pembenaran yang dapat dipertanggungjawabkan (Zaprukhan, 2016).

Sejalan dengan pemahaman tersebut, dalam tradisi Hindu dikenal ajaran epistemologis yang disebut *Catur Pramāṇa*, terutama dalam kerangka Nyaya Sutra yang menjadi dasar aliran Nyāya. Catur Pramāṇa merujuk pada empat cara memperoleh pengetahuan yang sah, yaitu: *Pratyakṣa*, *Anumāna*, *Upamāna*, dan *Śabda* (Maswinara, 1999). Keempat pramāṇa ini menunjukkan bahwa epistemologi Hindu memiliki struktur metodologis yang sistematis dan tidak kalah rigor dibandingkan tradisi epistemologi lainnya.

Pertama, *Pratyakṣa Pramāṇa* (persepsi langsung) merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan indrawi terhadap objek sebagaimana adanya. Dalam kerangka ini dikenal dua tingkat pengamatan: *Nirvikalpa Pratyakṣa* (pengamatan non-determinatif) dan *Savikalpa Pratyakṣa* (pengamatan determinatif). Pada tahap nirvikalpa, objek dipersepsi tanpa penilaian atau kategorisasi; sedangkan pada tahap savikalpa, pengamatan disertai identifikasi sifat, ciri, dan relasinya dengan subjek. Pembagian ini menunjukkan adanya kesadaran epistemik terhadap tahapan kognitif dalam proses mengetahui.

Kedua, *Anumāna Pramāṇa* (inferensi) merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran. Dalam sistem Nyāya, proses inferensi dilakukan melalui tahapan *avayava* yang terdiri atas lima unsur: *pratijñā* (pernyataan tesis), *hetu* (alasan), *udāharaṇa* (contoh atau aturan umum), *upanaya* (aplikasi pada kasus konkret), dan *nigamana* (kesimpulan). Struktur ini menunjukkan bahwa penyimpulan tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui prosedur logis yang ketat dan bertahap.

Ketiga, *Upamāna Pramāṇa* (analogi atau perbandingan), yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui pengenalan kesamaan antara objek yang belum dikenal dengan objek yang telah diketahui sebelumnya. Metode ini menegaskan pentingnya relasi komparatif dalam memperluas cakrawala pengetahuan.

Keempat, *Śabda Pramāṇa* (kesaksian otoritatif), yakni pengetahuan yang diperoleh melalui kesaksian dari sumber yang dapat dipercaya. Dalam tradisi Hindu, kesaksian ini dibedakan menjadi *Laukika Śabda* (kesaksian manusia yang kredibel secara rasional) dan *Vaidika Śabda* (kesaksian yang bersumber dari teks-teks suci yang diakui otoritasnya). Konsep ini menegaskan bahwa otoritas epistemik diakui, tetapi tetap dalam kerangka kredibilitas dan legitimasi moral-intelektual.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa epistemologi Hindu sejak zaman Weda hingga sistem filsafat klasik (*darśana*) menempatkan pengetahuan (*jñāna*) dan kebenaran (*satya*) sebagai inti pencarian spiritual dan intelektual manusia. Pengetahuan bukan sekadar akumulasi data, melainkan sarana menuju *mokṣa* (pembebasan). Struktur Catur Pramāṇa menunjukkan bahwa kebenaran tidak semata-mata bersifat subjektif, melainkan diuji melalui empat jalur epistemik yang berbeda cara kerjanya, yaitu persepsi, inferensi, analogi, dan

otoritas yang sah, bukan melalui satu prosedur verifikasi tunggal (lihat penjabaran lebih lanjut pada 3.3–3.4).

Namun, lanskap epistemologi mengalami perubahan radikal di era digital. Produksi dan distribusi informasi kini dimediasi oleh algoritma media sosial dan mesin pencari. Validitas suatu informasi sering kali tidak ditentukan oleh ketepatan metodologis atau kedalaman analisis, melainkan oleh tingkat popularitas, viralitas, dan resonansi emosionalnya. Dalam konteks ini, eksistensi diri kerap dibangun melalui citra digital, yaitu melalui jumlah like, komentar, dan share. Sebagaimana dianalisis oleh F. Budi Hardiman, logika “klik” dalam media sosial membentuk kesadaran baru, di mana eksistensi seseorang diukur dari visibilitas digitalnya. Ego tidak lagi bertumpu pada refleksi diri, melainkan pada pengakuan virtual (Hardiman, 2021a).

Perkembangan ini berdampak pada pergeseran makna kepakaran. Postmodernisme, sebagai arus pemikiran dan kondisi kebudayaan yang menekankan relativitas narasi besar (Jean-François Lyotard, 1984), menyediakan iklim intelektual yang turut memungkinkan kondisi post-truth berkembang, namun keduanya bukan satu periode historis yang sama. Post-truth lebih tepat dipahami sebagai kondisi epistemik dan komunikasi politik-sosial yang spesifik pada era digital kontemporer, ketika arus informasi menjadi komoditas utama dan siapa pun yang secara konsisten memproduksi konten dapat dipersepsikan sebagai “pakar”, meskipun tidak memiliki landasan metodologis yang memadai. Platform seperti YouTube, Instagram, X, dan Facebook memungkinkan individu membangun otoritas berbasis popularitas. Dalam situasi ini, kepakaran bergeser dari makna epistemik menuju makna performatif, yaitu sebuah pergeseran yang difasilitasi oleh iklim relativisme postmodern, tetapi tidak identik dengannya.

Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai “kematian kepakaran” oleh Tom Nichols dalam karyanya *The Death of Expertise*. Nichols menegaskan bahwa problem utama bukanlah hilangnya kemampuan para ahli, melainkan lunturnya kepercayaan publik terhadap mereka. Masyarakat cenderung memilih informasi yang sesuai dengan preferensi pribadi tanpa melakukan verifikasi kepada sumber yang kompeten (Nichols, 2018). Anti-intelektualisme meningkat, hoaks menyebar luas, dan informasi yang belum teruji kerap diterima sebagai kebenaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa era digital menghadirkan tantangan serius terhadap struktur epistemologi klasik, termasuk dalam tradisi Hindu. Jika *Catur Pramāṇa* menawarkan empat jalur epistemik yang saling melengkapi untuk menguji validitas klaim, maka logika algoritmik media sosial justru memprioritaskan kecepatan, popularitas, dan sensasi, terlepas dari jalur epistemik mana pun yang sesungguhnya terpenuhi.

Uraian mengenai Catur Pramāṇa pada bagian ini mengembangkan lebih lanjut kerangka yang telah dirintis penulis pada kajian sebelumnya mengenai epistemologi Nyāya sebagai metode menghadapi hoaks (Harsananda, 2020), dengan memperdalam operasionalisasinya terhadap fenomena post-truth secara lebih luas pada sub-bab 3.3–3.4 berikut.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Otoritas Ilmiah Dan Para Ahli Mengalami Delegitimasi Di Hadapan Opini Publik Yang Didasarkan Pada Keyakinan Dan Narasi Emosional

Otoritas ilmiah merujuk pada posisi legitim yang dimiliki ilmu pengetahuan dan para ahli dalam menentukan validitas suatu klaim kebenaran. Legitimasi ini bersumber dari karakteristik dasar ilmu pengetahuan yang menekankan rasionalitas, objektivitas, metodologi sistematis, serta verifikasi empiris. Seorang ahli diakui memiliki otoritas karena telah melalui proses pendidikan formal, penelitian yang teruji, serta mekanisme seleksi akademik yang ketat. Dalam masyarakat modern, otoritas ilmiah menjadi fondasi pengambilan keputusan publik. Kebijakan kesehatan merujuk pada penelitian medis, isu lingkungan bertumpu pada sains iklim, dan regulasi teknologi didasarkan pada kajian ilmiah. Dengan demikian, otoritas ilmiah berfungsi sebagai penyeimbang subjektivitas opini publik.

Sejak era Pencerahan, perkembangan peradaban modern sangat ditopang oleh kepercayaan terhadap sains dan kepakaran (Adib, 2014). Ilmu pengetahuan dibangun melalui prosedur rasional dan standar objektivitas yang ketat. Namun dalam beberapa dekade terakhir, legitimasi tersebut semakin sering dipertanyakan. Dalam isu vaksin, perubahan iklim, maupun teknologi digital, otoritas para ahli kerap berhadapan dengan opini publik yang lebih dipengaruhi oleh keyakinan personal, identitas kelompok, kepercayaan religius, serta narasi emosional yang tersebar melalui media sosial. Delegitimasi ini tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkelindan.

3.2.1 Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada kondisi kognitif dan psikologis dalam diri individu maupun masyarakat yang memengaruhi cara berpikir dan menilai kebenaran. Salah satu kerangka klasik yang relevan adalah gagasan Francis Bacon dalam *Novum Organum*. Bacon memperkenalkan konsep *idols* (berhalal-berhalal pikiran) sebagai doktrin negatif yang menyesatkan akal manusia (Maksun, 2011).

Empat jenis *idols* tersebut adalah:

1. *Idols of the Tribe* – Kekeliruan yang bersumber dari kecenderungan alami manusia yang memproyeksikan pandangannya sendiri ke dalam realitas, sehingga mengabaikan fakta objektif.
2. *Idols of the Cave* – Kekeliruan akibat subjektivitas pribadi yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, dan prasangka individual.
3. *Idols of the Marketplace* – Kekeliruan yang timbul dari penyalahgunaan bahasa dan kekuatan retorika kata-kata.
4. *Idols of the Theatre* – Kekeliruan akibat menerima sistem pemikiran atau tradisi lama secara dogmatis tanpa kritik rasional.

Bacon menegaskan bahwa ilmu yang benar harus dibangun melalui observasi yang bebas dari prasangka-prasangka tersebut. Namun dalam realitas sosial kontemporer, berbagai *idols* ini justru menemukan bentuk baru dalam ekosistem digital. Manusia cenderung mengukur kebenaran berdasarkan perspektif kelompoknya (*tribe*), terjebak dalam prasangka personal (*cave*), terpengaruh permainan bahasa dan slogan (*marketplace*), serta menerima narasi tradisional atau ideologis tanpa kritik (*theatre*). Sebagaimana telah dipetakan pada kajian sebelumnya (Harsananda, 2020), keempat *idols* ini dapat dikorelasikan dengan bias kognitif kontemporer: *Idols of the Tribe* berkorelasi

dengan confirmation bias, Idols of the Marketplace dengan bandwagon effect, sementara Idols of the Cave dan Idols of the Theatre masing-masing tercermin pada in-group bias dan penerimaan dogmatis terhadap narasi tradisional di ruang digital.

Sejalan dengan itu, kesesatan berpikir (logical fallacy) juga menjadi faktor penting dalam melemahkan otoritas ilmiah. Kesesatan terjadi karena penyalahgunaan bahasa atau ketidaktepatan relevansi premis terhadap kesimpulan; argumen yang tampak meyakinkan sering kali tidak memenuhi standar logika yang sah (Adib, 2014). Hubungan antara logical fallacy dan erosi otoritas ilmiah bekerja melalui mekanisme berikut: fallacy memungkinkan klaim yang lemah secara epistemik, karena tidak didukung premis yang relevan atau struktur inferensi yang valid, tampil kuat secara persuasif, karena daya tarik retoriknya tidak bergantung pada validitas logis melainkan pada kefasihan naratif, pengulangan, atau resonansi emosional. Akibatnya, masyarakat awam yang tidak terlatih mengevaluasi struktur argumen dapat mempertanyakan atau menolak klaim ilmiah yang sah berdasarkan alasan yang secara logis tidak valid, sementara menerima klaim yang keliru namun disampaikan secara meyakinkan. Dalam ruang publik digital, kondisi ini diperparah karena format komunikasi (utas singkat, video pendek, judul yang memancing emosi) secara struktural lebih memihak retorika ketimbang argumentasi yang lengkap dan dapat diverifikasi. Selain itu, bias kognitif turut memperkuat delegitimasi otoritas ilmiah. Bias kognitif adalah penyimpangan sistematis dalam cara manusia memproses informasi. Menurut Daniel Kahneman dalam *Thinking, Fast and Slow*, manusia tidak selalu berpikir rasional karena keterbatasan kognitif dan dominasi intuisi cepat (Kahneman, 2011). Beberapa bias yang relevan dengan delegitimasi otoritas ilmiah antara lain:

- a. *Confirmation Bias* – Kecenderungan mencari dan menerima informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada, serta menolak informasi yang bertentangan.
- b. *Anchoring Bias* – Terlalu bergantung pada informasi pertama yang diterima sebagai “jangkar” dalam menilai informasi selanjutnya.
- c. *Availability Heuristic* – Menganggap suatu peristiwa lebih mungkin terjadi hanya karena mudah diingat atau sering diberitakan.
- d. *Bandwagon Effect* – Cenderung mempercayai sesuatu karena banyak orang lain mempercayainya.
- e. *In-group Bias* – Mempercayai informasi dari kelompok sendiri dan menolak informasi dari kelompok lain.
- f. *Halo Effect* – Kesan positif terhadap seseorang memengaruhi penilaian terhadap seluruh pernyataannya.

Bias-bias ini membuat individu merasa yakin terhadap keyakinannya meskipun tidak didukung oleh proses verifikasi ilmiah. Dalam kondisi ini, rasionalitas publik melemah karena keputusan lebih ditentukan oleh afiliasi emosional daripada argumentasi logis. Dengan demikian, faktor internal seperti *idols*, logical fallacy, dan bias kognitif secara signifikan berkontribusi pada delegitimasi otoritas ilmiah.

3.2.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mempercepat erosi legitimasi kepakaran. Berbeda dari faktor internal yang bersumber dari struktur kognisi individu, faktor eksternal bekerja pada level ekosistem informasi itu sendiri, dan dapat dipahami sebagai rantai insentif yang saling memperkuat.

Titik pangkalnya adalah ekonomi atensi: karena pendapatan platform digital bertumpu pada keterlibatan (engagement) pengguna, algoritma media sosial dirancang memprioritaskan konten berdasarkan potensi viralitas, bukan kualitas epistemik, sehingga popularitas secara struktural menggantikan kredibilitas sebagai ukuran keabsahan informasi (bandingkan kerangka faktor serupa yang dirumuskan penulis pada konteks hoaks di (Harsananda, 2020) meski dengan penekanan berbeda di sini pada mekanisme algoritmik, bukan taksonomi faktor).

Insentif ekonomi ini kemudian berinteraksi dengan dua kerentanan struktural lain. Pertama, kerentanan pada sisi produksi informasi: praktik jurnalistik yang kurang menekankan verifikasi dan reliabilitas sumber, yang didorong oleh tekanan kecepatan atas akurasi, membuat kanal-kanal yang semestinya menjadi penjaga gerbang epistemik (gatekeeper) justru ikut mempercepat sirkulasi klaim yang belum teruji. Kedua, kerentanan pada sisi konsumsi informasi: rendahnya literasi media membuat sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan memadai untuk memfilter atau memverifikasi klaim yang mereka terima, sehingga volume akses informasi yang nyaris tanpa batas (melalui platform seperti Google, YouTube, dan media sosial) tidak berbanding lurus dengan kapasitas evaluasi kritis penggunaanya.

Dengan demikian, faktor eksternal bukan sekadar daftar sebab yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan satu rantai kausal: insentif ekonomi platform → melemahnya fungsi penjagaan gerbang jurnalistik → membanjirnya klaim tak-terverifikasi → diterima tanpa filter oleh publik dengan literasi media rendah. Rantai inilah yang secara struktural mempercepat pergeseran dari kredibilitas epistemik menuju popularitas sebagai ukuran validitas di ruang publik digital.

3.3 Operasionalisasi Catur Pramāṇa terhadap Fenomena Post-Truth di Ruang Digital

Untuk melampaui sekadar memaparkan Catur Pramāṇa dan faktor delegitimasi otoritas ilmiah secara sejajar, sub-bab ini menautkan keduanya secara langsung, bertumpu pada konsep Nyāya tentang syarat Āpta (sumber otoritatif yang sah) dan Pramāṇa-samplava (konvergensi multi-epistemik) sebagaimana dirumuskan Vātsyāyana dalam Nyāyabhāṣya (Maswinara, 1999).

Pertama, pada level Śabda Pramāṇa, Nyāyasūtra 1.1.7 menetapkan tiga syarat bagi seorang Āpta yang kesaksiannya dapat diterima sebagai pengetahuan sah: (1) sāṅgātṛtadharmā, yaitu penguasaan faktual langsung atas objek yang dibicarakan; (2) bhūdayā, yaitu integritas moral dan motif welas asih, bukan kepentingan pribadi; dan (3) yathābhūthacikhyāpayiṣā, yaitu kehendak tulus menyampaikan kebenaran tanpa distorsi (Gotama, 2003). Fenomena “kepakaran performatif” di media sosial (bagian 3.1) dapat dibaca sebagai kegagalan sistematis memenuhi ketiga syarat Āpta ini sekaligus: kreator konten viral umumnya tidak memiliki penguasaan faktual terverifikasi (gagal syarat pertama), sering didorong oleh ekonomi atensi dan insentif finansial ketimbang welas asih terhadap audiens (gagal syarat kedua), dan tidak jarang mendistorsi informasi demi engagement (gagal syarat ketiga). Dari perspektif Nyāya, otoritas semacam ini secara epistemik bukan Śabda Pramāṇa yang sah, melainkan pramāṇabhāsa, yaitu kognisi keliru yang menyerupai pengetahuan valid (Gotama, 2003), terlepas dari besarnya jumlah pengikut atau interaksi yang diperoleh.

Kedua, pada level Anumāna, mekanisme viralitas di ruang digital sering kali mereplikasi struktur inferensi tanpa memenuhi syarat vyāpti (relasi keterikatan

tak terpisahkan antara penanda/hetu dan yang disimpulkan/sādhya) yang dituntut Nyāyasūtra 1.1.5. Generalisasi tergesa yang lazim ditemukan dalam konten viral, yaitu menyimpulkan klaim kausal luas dari segelintir kasus anekdotal yang emosional, persis merupakan bentuk anumāna yang cacat karena vyāpti-nya tidak teruji secara memadai, sebuah persoalan yang secara struktural sejalan dengan problem induksi yang justru sudah diakui sebagai titik rentan dalam epistemologi Nyāya sendiri (Gotama, 2003; lih. juga bagian 3.4).

Ketiga, dan barangkali paling penting, konsep Pramāṇa-samplava Nyāya, yaitu bahwa satu objek dapat dan idealnya divalidasi melalui konvergensi independen dari beberapa pramāṇa, menyediakan kerangka kritis untuk membongkar ilusi “konvergensi” di echo chamber digital. Ketika algoritma media sosial menyodorkan klaim yang sama berulang kali dari berbagai akun, pengguna dapat keliru mengira dirinya menyaksikan konvergensi multi-sumber yang independen, padahal seluruh “sumber” tersebut pada dasarnya berasal dari satu simpul informasi yang sama yang direplikasi algoritmik. Ini adalah pramāṇa-samplava semu (pseudo-convergence), yang berbeda secara kualitatif dari konvergensi genuin yang disyaratkan Nyāya, yang menuntut independensi jalur epistemik, bukan sekadar pengulangan kuantitatif.

3.4 Batasan dan Refleksi Kritis atas Kerangka Catur Pramāṇa

Sebagai kerangka normatif, Catur Pramāṇa sendiri bukan tanpa titik rentan yang perlu diakui secara jujur, agar penggunaannya dalam artikel ini tidak jatuh pada romantisasi epistemologi Hindu sebagai solusi tanpa cela. Setidaknya tiga keberatan filosofis layak dicatat (Gotama, 2003): pertama, asumsi realisme naif bahwa indra mampu menangkap sifat objek tanpa distorsi struktural persepsi itu sendiri, yang mengabaikan temuan psikologi-kognitif kontemporer (termasuk bias-bias yang dibahas pada bagian 3.2.1) tentang keterbatasan persepsi manusia; kedua, problem regresi tak berhingga (anavasthā) dalam menguji validitas pramāṇa melalui keberhasilan praktis, yang oleh Vātsyāyana coba diselesaikan dengan pembatasan penyelidikan pada kasus-kasus yang memiliki alasan keraguan spesifik, namun tetap menyisakan celah filosofis; dan ketiga, yang paling relevan bagi kajian ini, problem sirkularitas dalam penetapan status Āpta: seseorang diakui sebagai Āpta karena otoritas ajarannya, sementara ajarannya diakui sah karena bersumber dari Āpta.

Titik rentan ketiga ini justru menjadi peringatan metodologis penting: kerangka Catur Pramāṇa tidak dapat digunakan begitu saja sebagai instrumen otomatis untuk membedakan pakar sejati dari pakar performatif di ruang digital, karena penentuan siapa yang memenuhi kriteria Āpta itu sendiri tetap memerlukan penilaian kontekstual, bukan prosedur mekanis. Dengan demikian, Catur Pramāṇa lebih tepat diposisikan sebagai kerangka diagnostik yang mempertajam pertanyaan kritis terhadap klaim epistemik di ruang publik digital, bukan sebagai algoritma pemutus mutlak antara pengetahuan sah dan disinformasi.

IV. SIMPULAN

Dari kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa fenomena erosi otoritas ilmiah merupakan konsekuensi epistemologis sekaligus sosiologis dari perkembangan teknologi digital, media sosial, dan algoritma informasi. Proses desentralisasi pengetahuan yang semula terkonsentrasi pada otoritas akademik, institusi riset, dan para pakar, kini mengalami pergeseran menuju legitimasi

berbasis popularitas, resonansi emosional, dan preferensi identitas kelompok. Pergeseran ini menandai lahirnya era *post-truth*, di mana kebenaran objektif tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam pembentukan opini publik, serta meningkatnya skeptisisme ilmiah yang berimplikasi pada delegitimasi otoritas akademik.

Dalam perspektif epistemologi Hindu, khususnya melalui ajaran Catur Pramāṇa (Pratyakṣa, Anumāna, Upamāna, dan Śabda), kebenaran dicapai melalui empat jalur epistemik yang berbeda cara kerjanya, bukan satu prosedur verifikasi tunggal, sebagaimana diuraikan pada bagian 3.3 dan 3.4. Ajaran ini menekankan bahwa pengetahuan bukan sekadar akumulasi informasi, melainkan instrumen pencapaian kebenaran dan pembebasan (mokṣa). Namun, sebagaimana ditunjukkan pada analisis operasionalisasi di atas, struktur epistemik yang plural dan berdisiplin tersebut kini terdesak oleh mekanisme algoritmik media digital yang memproduksi pramāṇa-samplava semu dan pramāṇābhāsa berskala massal, lebih mengutamakan keterjangkauan dan viralitas ketimbang validitas pada jalur epistemik mana pun. Dengan demikian, epistemologi klasik Hindu, dengan kesadaran penuh atas keterbatasannya sendiri (3.4), menyediakan landasan normatif sekaligus kritis, bukan solusi final, untuk memahami disrupsi epistemologis era kontemporer.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi delegitimasi otoritas ilmiah dapat dikategorikan ke dalam dua ranah. Faktor internal meliputi bias kognitif, kesesatan berpikir (*logical fallacies*), serta dominasi “doktrin negatif” sebagaimana diuraikan Francis Bacon, yang membuat individu lebih menerima narasi emosional daripada argumentasi rasional. Adapun faktor eksternal mencakup lemahnya praktik jurnalisme, rendahnya literasi media, ketimpangan pendidikan, serta penetrasi teknologi digital yang mempercepat diseminasi disinformasi. Sinergi antara faktor internal dan eksternal ini mempercepat proses erosi otoritas pengetahuan dalam ruang publik digital.

Fenomena ini memiliki implikasi yang luas, tidak hanya pada ranah epistemologis, tetapi juga pada dimensi etis, politik, dan sosial. Ketika kepercayaan terhadap pengetahuan berbasis bukti melemah, ruang publik terancam dikuasai relativisme epistemik yang rentan terhadap manipulasi politik dan ekonomi. Oleh karena itu, urgensi penguatan literasi epistemik dan digital menjadi semakin krusial. Revitalisasi nilai-nilai epistemologi Hindu, dengan penekanan pada verifikasi rasional, kesaksian otoritatif, dan kesadaran spiritual, dapat menjadi salah satu kerangka konseptual dalam menanggulangi krisis ini. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa erosi otoritas pengetahuan tidak semata-mata merupakan persoalan epistemologis, melainkan sebuah krisis multidimensional yang menuntut respons akademis, etis, dan praksis. Upaya pemulihan legitimasi otoritas pengetahuan harus dilakukan melalui integrasi pendidikan kritis, peningkatan literasi digital, serta penguatan nilai-nilai filosofis yang menempatkan kebenaran sebagai orientasi utama dalam kehidupan sosial dan intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, H. M. (2014). *Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Logika Ilmu Pengetahuan*. Pustaka Pelajar.
- Bagus, L. (2005). *Kamus Filsafat* (1st ed.). PT. Gramedia.
<http://philpapers.org/rec/SHOMKF>
- Gotama. (2003). *Nyayadarsana of Gotama*. New Bharatiya Book Corporation.

- Hardiman, F. B. (2021a). *Aku Klik Maka Aku Ada (Manusia dalam Revolusi Digital)*. Kanisius.
- Hardiman, F. B. (2021b). *Aku Klik Maka Aku Ada (Manusia dalam Revolusi Digital)*. Kanisius.
- Harsananda, H. (2020). Hoaks dan Cara Mengatasinya Perspektif Nyaya Darsana. *Sanjiwani*, 9, 126–134.
- Ihsan, H. A. F. (2010). *Filsafat Ilmu*. Rineka Cipta.
- Jean-François Lyotard. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (cetak ulang). University of Minnesota Press.
- Kaelan, M. S. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma Yogyakarta.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Gramedia Pustaka Utama.
- Maksun, A. (2011). *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Aziz Safa, Ed.; 1st ed.). AR-RUZZ MEDIA.
- Maswinara, I. W. (1999). *Sistem Filsafat Hindu (Sarva Darsana Samgraha)* (2nd ed.). Paramita.
- McIntyre, L. (2018). *Post-Truth*. MIT Press.
- Nichols, T. (2018). *Matinya Kepakaran (Perlawanan Terhadap Pengetahuan Yang Telah Mapan dan Mudaratnya)*. Gramedia.
- Piliang, Y. A. (2010). *Post Realitas (Realitas Kebudayaan dalam Era Post-metafisika)* (M Nasrudin, Ed.; Alfathri A). Jalasutra.
- Zapruckan. (2016). *Filsafat Ilmu Sebuah Analisis Kontemporer* (Nuran Hasanah, Ed.; 1st ed.). PT. raja Grafindo Persada.